

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2017

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Dr. Drs. Syahrul Mamma, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Laporan Operasional	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7
Penjelasan Umum	7
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	39
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
Pengungkapan Penting Lainnya	50
Lampiran dan Daftar	55

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Desember 2017

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Dr. Drs. Syahrul Mamma, S.H., M.H.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (*Audited*) Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.24.455.228.824 atau mencapai 14,58 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.18.537.712.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp.201.655.777.965 atau mencapai 95,9 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.211.452.865.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.796.021.732.426 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.2.490.116.772; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0.; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.736.195.893.033; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.57.335.722.621. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.687.370.171 dan Rp.794.334.362.255.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.23.771.621.001, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.211.118.083.543 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(187.346.462.542). Surplus Kegiatan

Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 260.367.839 dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(187.086.094.703).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.292.289.167.337 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(187.086.094.703) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.511.971.178.080 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.177.160.111.541 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp.794.334.362.255.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Angg	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,537,712,000	24,455,228,824	131.92	20,584,411,010
JUMLAH PENDAPATAN		18,537,712,000	24,455,228,824	131.92	20,584,411,010
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	79,928,934,000	74,862,308,504	93.66	73,242,114,293
Belanja Barang	B.4	118,505,951,000	114,158,974,218	96.33	102,975,818,442
Belanja Modal	B.5	13,017,980,000	12,634,495,243	97.05	13,277,671,743
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		211,452,865,000	201,655,777,965	95.37	189,495,604,478

**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	114,498,500	330,983,425
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	1,400,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	150,255,771	2,566,982,406
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	1,365,000
Piutang Bukan Pajak	C.5	216,693,573	213,882,930
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	(119,696,602)	(110,975,830)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.9	96,996,971	102,907,100
Belanja Dibayar di Muka	C.10	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.11	-	-
Persediaan	C.12	2,126,965,530	1,991,191,494
Jumlah Aset Lancar		2,490,116,772	4,993,429,425
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.16	593,083,855,000	109,473,427,530
Peralatan dan Mesin	C.17	354,070,105,321	351,548,795,418
Gedung dan Bangunan	C.18	92,544,099,306	99,967,203,796
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.19	1,256,957,452	728,904,352
Aset Tetap Lainnya	C.20	1,557,052,921	1,520,700,421
Konstruksi dalam pengerjaan	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.22	(306,316,176,967)	(327,566,748,850)
Jumlah Aset Tetap		736,195,893,033	235,672,282,667
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	13,239,685,100	12,037,785,550
Aset Lain-Lain	C.24	86,942,807,273	80,037,571,924
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(42,846,769,752)	(37,088,509,155)
Jumlah Aset Lainnya		57,335,722,621	54,986,848,319
JUMLAH ASET		796,021,732,426	295,652,560,411
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	C.26	114,498,500	330,983,425
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	690,390,932	2,770,893,649
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	3,425,650	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	879,055,089	261,516,000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1,687,370,171	3,363,393,074
JUMLAH KEWAJIBAN		1,687,370,171	3,363,393,074
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	794,334,362,255	292,289,167,337
JUMLAH EKUITAS		794,334,362,255	292,289,167,337
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		796,021,732,426	295,652,560,411

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	23,771,621,001	20,095,912,139
JUMLAH PENDAPATAN		23,771,621,001	20,095,912,139
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	74,987,151,027	73,609,257,643
Beban Persediaan	D.3	10,391,928,451	8,738,641,632
Beban Barang dan Jasa	D.4	51,808,469,054	43,104,348,995
Beban Pemeliharaan	D.5	12,458,053,478	11,519,010,988
Beban Perjalanan Dinas	D.6	39,931,579,138	34,564,243,908
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	3,975,850,025
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	21,422,502,673	24,027,067,885
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	118,399,722	110,936,180
JUMLAH BEBAN		211,118,083,543	199,649,357,256
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(187,346,462,542)	(179,553,445,117)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(94,726,000)	4,496,000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6,774,000	8,000,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		101,500,000	3,504,000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		355,093,839	472,503,304
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		401,096,651	600,707,962
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		46,002,812	128,204,658
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		260,367,839	476,999,304
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(187,086,094,703)	(179,076,445,813)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPNP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(187,086,094,703)	(179,076,445,813)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	292,289,167,337	310,822,173,720
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(187,086,094,703)	(179,076,445,813)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	511,971,178,080	(20,505,232,017)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	50,154,440
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	506,806,980,045	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	5,164,198,035	(20,555,386,457)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		511,971,178,080	(20,505,232,017)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	177,160,111,541	181,048,671,447
EKUITAS AKHIR	E.5	794,334,362,255	292,289,167,337

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010.

Entitas berkedudukan di Gedung I Lantai 3 Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110.

Mengacu kepada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta tujuan dan sasaran sebagai penjabaran misi dan visi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menetapkan Strategi Kebijakan :

A. Peningkatan perlindungan konsumen dalam negeri Serta pengamanan pasar domestik

1. Pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga, dilakukan melalui :

- a. Telusuran standar ukuran secara nasional dan internasional.
- b. Penyiapan rumusan peraturan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga

2. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa, dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kegiatan pengawasan barang beredar.
- b. Peningkatan jenis barang beredar ber-SNI wajib

yang diawasi.

3. Peningkatan tertib ukur, dilakukan melalui :

a. Peningkatan UTTP yang telah memenuhi peraturan yang berlaku.

B. Penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, *trading house*, lembaga perlindungan konsumen dan eksportir agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan

1. Peningkatan kelembagaan dan SDM di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga, dilakukan melalui :

a. Peningkatan akumulasi BPSK yang terbentuk.
b. Peningkatan akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen.

2. Optimalisasi pemberdayaan konsumen, dilakukan melalui :

a. Peningkatan pemahaman konsumen dan tanggungjawab pengusaha.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan handal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	18,537,712,000	24,455,228,824
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	18,537,712,000	24,455,228,824
Belanja		
Belanja Pegawai	80,202,508,000	79,928,934,000
Belanja Barang	117,827,848,000	118,505,951,000
Belanja Modal	10,870,716,000	13,017,980,000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	208,901,072,000	211,452,865,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp.24.455.228.824*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.24.455.228.824 atau mencapai 131,19 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.18.537.712.000. Pendapatan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	-	7.059.002	-
Pendapatan Jasa	18.537.712.000	24.320.290.580	131,19
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tipikor	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Iuran dan Denda	-	40.260	-
Pendapatan Lain-lain	-	127.838.982	-
Jumlah	18.537.712.000	24.455.228.824	131,19

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami penurunan 10,80 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan kejaksaan dan peradilan tipikor, pendapatan iuran dan denda, serta pendapatan lain-lain, sedangkan kenaikan terjadi hanya pada pendapatan Jasa.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pengelolaan BMN	7,059,002	8,000,000	-11.76
Pendapatan Jasa	24,320,290,580	19,923,719,463	22.07
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tipikor	-	6,537,517	-100.00
Pendapatan iuran dan Denda	40,260	62,956,630	-99.94
Pendapatan Lain-lain	127,838,982	583,197,400	-78.08
Jumlah	24,455,228,824	20,584,411,010	18.80

Realisasi Belanja Negara Rp.201.655.777.965

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp.201.655.777.965 atau 95,9% dari anggaran belanja sebesar Rp.211.452.865.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	79,928,934,000	74,862,308,504	93.66
Belanja Barang	118,505,951,000	114,158,974,218	96.33
Belanja Modal	13,017,980,000	12,634,495,243	97.05
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	211,452,865,000	201,655,777,965	95.37
Pengembalian		(1,129,282,545)	-
Jumlah	211,452,865,000	200,526,495,420	94.83

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,65% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran terhadap belanja pegawai dan belanja barang.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	74,890,184,491	73,568,697,434	1.80
Belanja Barang	115,260,380,776	103,289,159,568	11.59
Belanja Modal	12,634,495,243	13,284,741,744	(4.89)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	202,785,060,510	190,142,598,746	6.65

*Belanja Pegawai
Rp.74.890.184.491*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.74.890.184.491 dan Rp.73.568.697.434. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,80 persen dari TA 2016.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	40,063,392,972	40,977,667,057	(2.23)
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	44,487,300	30,798,900	
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	2,667,651,650	0	-
Belanja Lembur	955,327,000	911,173,400	4.85
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	31,159,325,569	31,649,058,077	(1.55)
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	74,890,184,491	73,568,697,434	1.80
Pengembalian Belanja Pegawai	(27,875,987)	(326,583,141)	(91.46)
Jumlah Belanja	74,862,308,504	73,242,114,293	2.21

*Belanja Barang
Rp.115.260.380.776*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.115.260.380.776 dan Rp.103.289.159.568. Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan 11,59% dari Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja Kontribusi sepanjang TA 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12,109,896,215	14,639,331,169	(17.28)
Belanja Barang Non Operasional	19,500,529,603	12,361,215,952	57.76
Belanja Kontribusi	18,497,875		
Belanja Barang Persediaan	11,929,062,669	8,409,855,394	41.85
Belanja Jasa	20,060,906,487	16,117,267,406	24.47
Belanja Pemeliharaan	10,586,955,982	10,414,577,413	1.66
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	38,997,893,292	33,490,173,469	16.45
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2,056,638,653	1,365,483,565	50.62
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	-	6,491,255,200	(100.00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	115,260,380,776	103,289,159,568	11.59
Pengembalian Belanja	(1,101,406,558)	(313,341,126)	251.50
Jumlah Belanja	114,158,974,218	102,975,818,442	10.86

Belanja Modal
Rp.12.634.495.243

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.12.634.495.243 dan Rp.13.284.741.744. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2017 mengalami penurunan sebesar (4,89)% dibandingkan TA 2016 disebabkan oleh pemotongan anggaran untuk belanja modal pada seluruh Satker di lingkungan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,916,888,270	12,265,586,819	(27.30)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,596,186,323	664,279,425	140.29
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	2,121,420,650	354,875,500	497.79
Jumlah Belanja Kotor	12,634,495,243	13,284,741,744	-4.89
Pengembalian	0	-7070001	-
Jumlah Belanja	12,634,495,243	13,277,671,743	-4.84

Belanja Modal Tanah
Rp.0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T. A. 2017	REALISASI T. A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.8.916.888.270*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp.8.916.888.270, mengalami kenaikan sebesar (40431,31) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp.22.000.000. Hal ini disebabkan oleh pemotongan anggaran atas belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	1,783,377,654	22,000,000	8006.26
Personal Komputer	1,783,377,654	0	
Peralatan Personal Komputer	1,783,377,654	0	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1,783,377,654	0	
Alat Kantor Lainnya	1,783,377,654	0	
Meubelair	0	0	
Alat Pembersih	0	0	
Alat Pendingin	0	0	
Alat Dapur	0	0	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home US)	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	8,916,888,270	22,000,000	40431.31
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	8,916,888,270	22,000,000	40431.31

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.1.596.186.323*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.596.186.323 dan Rp.664.279.425.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	1,596,186,323	664,279,425	58.38
Jumlah Belanja Kotor	1,596,186,323	664,279,425	58.38
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	1,596,186,323	664,279,425	58.38

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp.0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	58.221.676.032	62.488.869.851	-6,83
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Belanja Modal
Lainnya
Rp.2.121.420.650*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.2.121.420.650 dan Rp.354.875.500.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2017 dan 2016*

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0.00
-	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.114.498.500*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.114.498.500 dan Rp.330.983.425 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2017 dan 2016*

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	114,498,500	330,983,425
Bank BRI No.acc 144401000001300	-	-
Jumlah	114,498,500	330,983,425

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.1.400.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp.1.400.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2017 dan 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Uang Tunai	1,400,000	-
Bank BRI No.acc 144401000001300	-	-
Jumlah	1,400,000	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.150.255.771*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.150.255.771 dan Rp.2.566.982.406.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari

UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2016

Keterangan	TH 2017	TH 2016
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	150,255,771	2,566,982,406
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	150,255,771	2,566,982,406

*Piutang PNBP
Rp.216.693.573*

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.216.693.573 dan Rp.213.882.930 Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2017 dan 2016

Uraian	TH 2017	TH 2016
Piutang PNBP	216,693,573	213,882,930
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	216,693,573	213,882,930

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2017 dan 2016

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar TPA
Rp.0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2017 dan 2016

No	Nama	TH 2017	TH 2016
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp.(119.696.602)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.(119.696.602) dan Rp.(110.975.830).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2017 dan 2016*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	216,693,573	0.50%	(119,696,602)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	216,693,573		(119,696,602)
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	216,693,573		(119,696,602)

Belanja Dibayar di Muka Rp.0

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2017 dan 2016*

Jenis	TH 2017	TH 2016
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.2.126.965.530*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.2.126.965.530 dan Rp.1.991.191.494. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2017 dan 2016

Jenis	TH 2017	TH 2016
Barang Konsumsi	275,817,220	466,497,984
Barang untuk Pemeliharaan	3,112,505	4,629,030
Suku Cadang	6,086,850	1,255,320
Pita Cukai, Materai dan Leges	1,816,430,000	1,497,513,600
Bahan Baku	25,518,955	21,295,560
Jumlah	2,126,965,530	1,991,191,494

*Tagihan TP/TGR
Rp.0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2017

adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
TA 2017 dan 2016*

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	-	-	-
2	-	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp.0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2017 dan 2016

No	Debitur	TH 2017	TH 2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp.0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2017

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

Rp.593.083.855.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.593.083.855.000 dan Rp.109.473.427.530 tidak terdapat perubahan pada nilai Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	593,083,855,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2016	593,083,855,000

Peralatan dan

Mesin

Rp.354.070.105.321

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.354.070.105.321 dan Rp.351.548.795.418 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	351.548.795.418
Mutasi tambah:	17.605.975.045
Saldo Awal	1.013.925.000
Pembelian	5.870.215.130
Transfer Masuk	6.205.067.140
Reklasifikasi Masuk	658.763.500
Penyelesaian Bangunan KDP	3.121.605.500
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	736.398.775
Pengembangan Nilai Aset	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0
Mutasi kurang:	-15.084.665.142
Penghapusan	-45.203.670
Transfer Keluar	(6.060.898.140)
Reklasifikasi Keluar	(653.863.500)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(8.324.699.832)
Saldo per 31 Desember 2017	354.070.105.321
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-302.943.669.111
Nilai Buku per 31 Desember 2017	51.126.436.210

*Gedung dan
Bangunan
Rp.92.544.099.306*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.92.544.099.306 dan Rp.99.967.203.796 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	99.967.203.796
Mutasi tambah:	37.730.430.573
Saldo Awal	56.229.000
Pembelian	112.353.400
Reklasifikasi Masuk	13.852.896.140
Penyelesaian Pembangunan KDP	1.004.321.506
Pengembangan Nilai Aset	252.465.675
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	22.452.164.852
Mutasi kurang:	(45.153.535.063)
Reklasifikasi Keluar	(11.962.677.864)
Koreksi Pencatatan	(30.739.568.199)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.451.289.000)
Saldo per 31 Desember 2017	92.544.099.306
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(3.031.688.276)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	89.512.411.030

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp.1.256.957.452

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.256.957.452 dan Rp.728.904.352. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	728.904.352
Mutasi tambah:	1.249.228.447
Koreksi Nilai tim Penertiban Aset	744.387.723
Reklasifikasi masuk	504.840.724
Mutasi kurang:	(721.176.347)
Koreksi Nilai tim Penertiban Aset	(684.216.347)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(36.960.000)
Saldo per 31 Desember 2017	1.256.956.452
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(340.819.580)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	916.136.872

Tidak terdapat mutasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp.1.557.052.921

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.1.557.052.921 dan Rp.1.520.700.421. Terdapat mutasi kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	1.477.078.821
Mutasi tambah:	88.024.100
Pembelian	83.999.100
Transfer Masuk	4.025.000
Mutasi kurang:	-8.050.000
Transfer Keluar	-4.025.000
Penghentian Aset	-4.025.000
Saldo per 31 Desember 2017	1.557.052.921
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.557.052.921

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak terdapat transaksi mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(306.316.176.967)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp. (306.316.176.967) dan Rp.(327.566.748.850). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2017 dan 2016*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	354.070.105.321	(302.943.669.111)	51.126.436.210
2	Gedung dan Bangunan	92.474.790.430	(3.042.643.825)	89.432.146.605
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.256.957.452	(340.819.580)	916.137.872
4	Aset Tetap Lainnya	1.557.052.921	0	1.557.052.921
Akumulasi Penyusutan		449.358.906.124	(306.327.132.516)	143.031.773.608

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp.13.239.685.100

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp.13.239.685.100 dan Rp.12.037.785.550.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen berupa *software* yang digunakan untuk menunjang

operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	12.037.785.550
Mutasi tambah:	2.231.870.550
saldo awal Software	-
Pembelian	1.408.006.550
Transfer Masuk	211.084.000
Pengembangan Nilai Aset	333.125.000
Pengembangan Melalui KDP	279.655.000
Mutasi Kurang	(1.029.971.000)
Transfer Keluar	(92.340.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(937.631.000)
Saldo per 31 Desember 2017	13.239.685.100
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(10.982.961.270)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	2.256.723.830

Aset Lain-Lain
Rp.86.942.807.273

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp.86.942.807.273 dan Rp.80.037.571.924. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	80.037.571.924
Mutasi tambah:	11.754.604.832
Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	10.816.973.832
Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya (ATB)	937.631.000
Mutasi kurang:	(4.849.369.483)
Penghapusan (BMN yg Dihentikan)	(1.436.512.756)
Reklasifikasi Keluar (BMN yg Dihentikan)	(2.399.960.000)
Usulan BMN RB	(157.753.950)
Transfer Keluar (BMN yg Dihentikan)	(118.744.000)
Koreksi Pencatatan (BMN yg Dihentikan)	(2)
Penggunaan Kembali BMN yg Dihentikan	(736.398.775)
Saldo per 31 Desember 2017	86.942.807.273
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 31 Desember 2017	86.942.807.273

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya

Rp.(42.846.769.752)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.(42.846.769.752) dan Rp.(37.088.509.155). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra

akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	12.386.838.050	-10.982.961.270	1.403.876.780
Lisensi	153.719.050	-83.414.649	70.304.401
ATB Lainnya	699.128.000	0	699.128.000
Jumlah	13.239.685.100	-11.066.375.919	2.173.309.181
Aset Lain-lain	74.643.100.222	(31.780.393.833)	42.862.706.389
Jumlah	87.882.785.322	-42.846.769.752	45.036.015.570

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN
Rp.114.498.500*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.114.498.500 dan Rp.330.983.425. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.690.390.932*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.690.390.932 dan Rp.2.770.893.649. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	280,537,603	Uang Makan dan Tunkin 2017
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	170,651,196	listrik, telepon, jasa pelayanan
lain-lain	239,202,133	Pihak ketiga
Total	690,390,932	

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.879.055.089*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.879.055.089 dan Rp.261.516.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2017 dan TA 2016*

Uraian	TH 2017	TH 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.3.425.650*

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.3.425.650 dan Rp.0.

*Ekuitas
Rp.794.334.362.255*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.794.334.362.255 dan Rp.292.289.167.337. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp.23.830.104.408

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.23.830.104.408 dan Rp.20.670.990.150. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	5,220,000	8,000,000	(34.75)
Pendapatan Jasa	23,755,310,403	20,003,588,603	18.76
Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Hasil Tipikor	0	6,537,517	(100.00)
Pendapatan luran dan Denda	40,260	62,956,630	(99.94)
Pendapatan lain-lain	69,533,745	589,907,400	(88.21)
Jumlah	23,830,104,408	20,670,990,150	15.28

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pemindahtanganan BMN, Pendapatan Jasa berasal dari jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Hasil Tipikor berasal dari hasil denda dan sebagainya, Pendapatan luran dan Denda berasal dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, sedangkan pendapatan lain-lain berasal dari penerimaan kembali belanja Pegawai dan Barang TAYL serta penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

Beban Pegawai

Rp.101.437.649.289

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.101.437.649.289 dan Rp.73.609.257.354. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	29.109.397.650	29.718.150.416	(2,05)
Beban Pembulatan Gaji	413.082	434.673	(4,97)
Beban Tunjangan-tunjangan	36.548.552.553	7.539.716.383	384,75
Beban Uang Makan PNS	3.690.645.950	3.808.284.400	(3,09)
Beban Honorarium dan Vaksinasi	-	-	#DIV/0!
Beban Gaji pokok Pejabat Negara	44.487.300	30.798.900	44,44
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus)	31.091.737.804	31.600.699.182	(1,61)
Beban Uang Lembur	952.414.950	911.173.400	4,53
Jumlah	101.437.649.289	73.609.257.354	37,81

*Beban Persediaan
Rp.10.391.928.451*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.10.391.928.451 dan Rp.8.738.641.632. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7,098,240,938	6,172,052,577	15.01
Beban Persediaan pita cukai, meterai dan leges	1,353,217,800	352,747,600	283.62
Beban Persediaan Bahan Baku	1,810,406,300	2,113,714,405	(14.35)
Beban Persediaan Lainnya	130,063,413	100,127,050	29.90
Jumlah	10,391,928,451	8,738,641,632	18.92

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.51.808.469.054*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.51.808.469.054 dan Rp.43.104.348.995. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	12,108,616,645	14,619,958,169	(17.18)
Beban Barang Non Operasional	19,493,204,603	12,361,215,952	57.70
Beban Jasa	9,048,685,668	6,553,709,124	38.07
Beban Jasa Lainnya	11,157,962,138	9,556,595,750	16.76
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	12,870,000	(100.00)
Jumlah	51,808,469,054	43,104,348,995	20.19

*Beban
Pemeliharaan
Rp.12.458.053.478*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.12.458.053.478 dan Rp. 11.519.010.988. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,234,818,682	4,442,832,247	17.83
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,436,507,536	5,699,649,396	(4.62)
Beban Pemeliharaan Jaringan	18,000,000	59,880,000	(69.94)
Beban Persediaan Bahan Pemeliharaan	241,934,145	205,830,790	17.54
Beban Persediaan Suku Cadang	1,499,293,115	971,818,555	54.28
Beban Pemeliharaan Lainnya	27,500,000	139,000,000	0.00
Jumlah	12,458,053,478	11,519,010,988	8.15

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.39.931.579.138*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.39.931.579.138 dan Rp. 34.564.243.908. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	25,021,130,578	20,530,337,249	21.87
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,835,125,000	2,667,228,000	6.29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,285,797,800	4,538,739,002	16.46
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,821,042,197	5,489,958,502	(12.18)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,693,929,261	1,191,720,005	42.14
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	274,554,302	146,261,150	87.72
Jumlah	39,931,579,138	34,564,243,908	15.53

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.975.850.025. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	3,962,850,025	(100.00)
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	13,000,000	(100.00)
Jumlah	0	3,975,850,025	(100.00)

*Beban Bantuan
Sosial Rp.0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.21.422.502.673

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.21.422.502.673 dan Rp. 24.027.067.885. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15,983,100,403	20,953,875,909	(23.72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,402,624,385	2,101,905,898	109.46
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	188,132,391	27,974,038	572.52
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	231,589,376	376,483,017	(38.49)
Jumlah Penyusutan	20,805,446,555	23,460,238,862	619.78
Beban Amortisasi Software	543,133,907	484,466,813	12.11
Beban Penyusutan aset lain-lain	73,922,211	82,362,210	(10.25)
Jumlah Amortisasi	617,056,118	566,829,023	8.86
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	21,422,502,673	24,027,067,885	628.64

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp.118.399.722

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.118.399.722 dan Rp. 110.936.180. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2017 dan 2016*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	118,399,722	110,936,180	6.73
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	118,399,722	110,936,180	6.73

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.401.124.987

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	42,675,927	220,462,881	(80.64)
Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	8,983,680	346,615,130	(97.41)
Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain TAYL	1,603,800	0	#DIV/0!
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	928,336	7,772,389	(88.06)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	346,933,244	33,629,951	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	401,124,987	608,480,351	(34.08)

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp.0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2017 dan 2016

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura.Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.292.289.167.337

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.292.289.167.337 dan Rp.310.822.173.720.

Defisit LO
Rp.(187.086.094.703)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.(187.086.094.703) dan Rp.(179.076.445.813). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.50.154.440. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.
506.806.980.045

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.506.806.980.045 dan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp.5.164.198.035

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.5.164.198.035 dan Rp.(20.555.386.457). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi penyusutan gedung

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2017

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	2.101.905.898
Jumlah	2.101.905.898

Koreksi Lain-Lain
Rp.0

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.177.160.111.541 dan Rp.181.048.671.447 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	24,455,228,824
Ditagikan ke Entitas Lain	(201,655,777,965)
Transfer Masuk	(1,980,765,744)
Transfer Keluar	2,021,203,344
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(177,160,111,541)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp.(20.584.447.482) sedangkan DKEL sebesar Rp.189.495.604.478.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.16.317.544.228 terdiri dari:

No	Jenis		Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	16,317,544,228
3	Persediaan	-	-
	Jumlah	-	16,317,544,228

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.180.066.249.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp.0. Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ekuitas Akhir
Rp. 794.334.362.255

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.794.334.362.255 dan Rp. 292.289.167.337.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

Pada Tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester II, Satuan kerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan pembayaran Tunjangan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2017 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Inayat Iman
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sofiansah
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Didit Maihatir
Bendahara	: Ana Nurdana

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Frida Adiati
Pejabat Pembuat Komitmen	: Eko Sudradjat
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Didit Maihatir
Bendahara	: Anita Carolina

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan
Perlindungan Konsumen
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember
2017

Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
	Manfaat		Per 31-12-2016	Tahun 2017	Per 31-12-2017	Per 31-12-2017
Tanah						
TANAH PERSIL	-	593.083.855.000	-	-	-	593.083.855.000
Jumlah		593.083.855.000	-	-	-	593.083.855.000
Peralatan dan Mesin						
PERALATAN DAN MESIN	10	354.070.105.321	293.105.079.295	15.985.600.403	302.943.669.111	51.126.436.210
ALAT BESAR DARAT	8	4.784.901.500	4.769.685.511	7.137.326	4.773.832.837	11.068.663
ALAT BANTU	7	4.006.356.428	3.798.035.165	82.248.696	3.880.283.861	126.072.567
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	16.672.284.837	13.370.651.484	1.112.743.255	14.308.959.025	2.363.325.812
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	10	19.678.050	9.962.000	2.297.713	14.579.713	5.098.337
ALAT BENGKEL BERMESIN	5	1.152.574.200	280.209.946	112.227.627	392.437.573	760.136.627
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		242.323.400	249.373.099	11.048.601	227.201.700	15.121.700
ALAT UKUR	4	22.684.140.600	20.583.379.511	603.512.853	21.146.845.364	1.537.295.236
ALAT PENGOLAHAN	5	775.397.459	510.804.559	73.472.313	566.919.372	208.478.087
ALAT KANTOR	5	8.992.161.525	6.478.011.871	806.401.777	7.094.846.654	1.897.314.871
ALAT RUMAH TANGGA	5	15.228.312.646	11.554.688.921	1.418.972.555	12.838.072.684	2.390.239.962
ALAT STUDIO	5	2.170.001.579	1.939.901.805	206.048.886	1.980.392.391	189.609.188
ALAT KOMUNIKASI	10	1.676.252.884	623.537.654	137.630.478	751.189.132	925.063.752
PERALATAN PEMANCAR	5	991.694.000	306.324.884	98.081.153	381.470.362	610.223.638
ALAT KEDOKTERAN	5	6.688.941.349	6.645.235.614	44.625.199	6.630.825.813	58.115.536
ALAT KESEHATAN UMUM	8	73.329.250	73.329.250	-	73.329.250	-
UNIT ALAT LABORATORIUM	15	193.531.895.838	172.305.570.784	5.482.873.604	174.992.708.628	18.539.187.210
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	17.732.641.019	10.884.555.679	1.133.431.528	11.365.523.634	6.367.117.385
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRIK	10	4.692.650.775	1.770.137.326	248.623.198	1.895.058.538	2.797.592.237
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	2.952.310.450	2.859.824.132	81.179.418	2.941.003.550	11.306.900
RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE	7	281.215.300	263.837.792	14.417.142	278.254.934	2.960.366
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	15	7.142.269.869	4.734.582.622	436.401.850	5.277.791.329	1.864.478.540
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMIC	15	3.031.881.434	2.003.626.145	193.427.575	2.188.824.313	843.057.121
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI	10	16.729.834.710	9.259.147.784	1.321.632.945	10.586.268.729	6.143.565.981
PERSENJATAAN NON SENJATA API	5	1.680.020.811	851.450.405	552.380.271	1.403.830.676	276.190.135
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4	571.268.075	249.923.723	114.215.502	363.516.063	207.752.012
KOMPUTER UNIT	4	12.881.905.963	11.380.813.786	1.148.014.432	11.043.951.536	1.837.954.427
PERALATAN KOMPUTER	5	5.700.894.890	4.689.430.880	457.883.060	4.985.683.093	715.211.797
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	7.794.000	7.794.000	-	7.794.000	-
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10	29.130.630	15.554.970	2.776.168	18.331.138	10.799.492
SUMUR	10	177.408.000	84.969.093	16.807.074	101.776.167	75.631.833
ALAT PELINDUNG	10	2.530.000	-	253.000	253.000	2.277.000
ALAT KERJA PENERBANGAN	8	417.711.450	140.272.332	42.250.776	148.348.056	269.363.394
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10	483.000	483.000	-	483.000	-
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	285.159.400	347.223.568	22.584.428	220.332.996	
Jumlah		708.077.460.642	586.147.408.590	31.971.200.806	605.824.588.222	102.188.046.016
Gedung dan Bangunan						
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	92.544.099.306	33.956.723.714	4.418.575.348	3.031.688.276	89.512.411.030
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50	86.196.874.306	32.277.070.974	4.091.653.204	2.902.219.946	83.294.654.360
TUGU/TANDA BATAS	50	5.970.237.000	1.676.447.897	293.385.886	119.080.565	5.851.156.435
Jumlah		184.711.210.612	67.910.242.585	8.803.614.438	6.052.988.787	178.658.221.825
Jalan dan Jembatan						
JALAN	10	646.240.000	117.330.000	167.423.600	167.423.600	478.816.400
Jumlah		646.240.000	117.330.000	167.423.600	167.423.600	478.816.400
Irigasi						
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	20	192.866.000	59.447.412	9.627.312	7.030.101	185.835.899
BANGUNAN AIR KOTOR	20	90.126.000	47.043.757	5.788.462	3.360.815	86.765.185
Jumlah		282.992.000	106.491.169	15.415.774	10.390.916	272.601.084
Jaringan						
INSTALASI GARDU LISTRIK	40	417.851.452	168.720.896	11.081.479	166.365.879	251.485.573
INSTALASI PERTAHANAN	30	26.227.452	9.775.682	1.566.836	11.342.518	14.884.934

INSTALASI PENGAMAN	20	-	12.833.329	603.167	-	-
INSTALASI LAIN	5	78.210.000	9.776.250	3.910.500	13.686.750	64.523.250
JARINGAN LISTRIK	40	113.375.000	113.375.000	-	113.375.000	-
Jumlah		635.663.904	314.481.157	17.161.982	304.770.147	330.893.757
Aset Tetap Dalam Renovasi						
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	275.170.000	-	-	-	275.170.000
Jumlah		275.170.000				275.170.000
ASET TETAP LAINNYA						
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5	1.371.920.471				1.371.920.471
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK	5	3.950.000				3.950.000
BARANG BERCORAK KESENIAN	5	98.597.000				98.597.000
Jumlah		1.474.467.471	-	-	-	1.474.467.471
Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	4	86.942.807.273	26.442.209.918	290.851.812	31.780.393.833	55.162.413.440
TANAH PERSIL	4	17.639.495.672	-	-	-	17.639.495.672
ALAT BESAR DARAT	4	2.990.000	-	-	2.990.000	-
ALAT BANTU	4	299.268.600	302.782.600	-	299.268.600	-
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	11.768.073.000	11.475.303.002	25.748.571	11.703.701.573	64.371.427
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4	980.000	-	-	980.000	-
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4	33.220.000	-	-	33.220.000	-
ALAT UKUR	4	227.569.200	189.502.600	1.846.400	226.646.000	923.200
ALAT PENGOLAHAN	8	17.770.000	123.000	-	17.770.000	-
ALAT KANTOR	5	517.736.051	330.135.456	5.176.898	512.453.591	5.282.460
ALAT RUMAH TANGGA	5	381.414.140	136.267.950	4.871.068	371.683.940	9.730.200
ALAT STUDIO	8	221.886.400	11.485.800	-	221.886.400	-
ALAT KOMUNIKASI	15	22.402.980	15.110.000	800.000	22.402.980	-
PERALATAN PEMANCAR	15	24.760.500	-	608.275	23.543.950	1.216.550
ALAT KEDOKTERAN	10	1.810.000	-	-	1.810.000	-
UNIT ALAT LABORATORIUM	10	11.621.306.050	8.307.798.100	500.000	11.621.306.050	-
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	7	891.913.100	-	58.416.391	710.879.964	181.033.136
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	372.870.375	125.805.998	21.110.432	270.893.416	101.976.959
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	10	111.007.100	5.671.100	-	111.007.100	-
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4	9.518.000	-	644.296	8.873.703	644.297
ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	4	9.370.000	1.658.000	-	9.370.000	-
KOMPUTER UNIT	8	2.419.480.086	906.821.954	-	2.419.480.086	-
PERALATAN KOMPUTER	50	263.192.929	72.890.000	137.500	263.055.429	137.500
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	50	149.475.000	-	-	149.475.000	-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3.757.499.000	713.924.810	75.149.980	789.074.790	2.968.424.210
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	5	2.451.289.000	1.376.722.865	35.976.398	532.085.979	1.919.203.021
INSTALASI PERTAHANAN	5	36.960.000	-	603.167	14.039.663	22.920.337
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	5	75.000	-	-	-	75.000
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1	3.950.000	-	-	-	3.950.000
Jumlah		140.200.089.456	50.414.213.153	522.441.188	62.118.292.047	78.081.797.409
Total		1.629.387.149.085	705.010.166.654	41.497.257.788	674.478.453.719	954.843.868.962